



LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)

**TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Metode Evaluasi Renja	5
BAB II. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	8
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol (Tabel 2.1)	8
BAB III. PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DPA, RENJA DAN RENSTRA BADAN KESBANGPOL	11
A. Perbandingan Jumlah Program DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah	11
B. Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah	11
C. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah	12
BAB IV. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RENJA	13
A. Capaian Target Indikator Sasaran	13
B. Capaian Target Indikator Program	14
C. Capaian Target Indikator Kegiatan	18
BAB V. KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	37
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	38
B. Rekomendasi	39
C. Lampiran	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta hasil evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan diimplementasikan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Evaluasi Renja dimana pelaksanaan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Renja Perangkat daerah.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah provinsi mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi

pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah ini dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah provinsi dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Evaluasi pelaksanaan Renja ini dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kesbangpol Tahun 2020 Triwulan VI adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026;
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017)
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Penyajian Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud dari Penyajian Laporan Evaluasi Renja ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025 hingga Triwulan IV berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2024 hingga Triwulan IV.
3. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2025.

D. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

- a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah ini adalah dengan menggunakan formulir evaluasi Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing bidang.

b. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja ini adalah dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Perangkat Daerah; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 1	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 2	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 3	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 4	Status
1	22,5 % ≤ 100 %	45 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat tinggi (ST)
2	20 % ≤ 22,5 %	39 % ≤ 44 %	58 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	17 % ≤ 19 %	33 % ≤ 38 %	50 % ≤ 57%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	13 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Teknik Analisis Data

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang hadapi perangkat daerah dalam pencapaian target Renja Perangkat Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESBANGPOL

Dalam Bab ini berisi tentang uraian tujuan, sasaran dan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang dievaluasi. Penyajian tujuan, sasaran dan Renja Perangkat Daerah pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbanpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
1.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Beragama yang Rukun, Toleran, Demokratis Berlandaskan Pancasila dan UUD'45 di Provinsi Kepulauan Riau	1. Meningkatnya kapasitas Lembaga Demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau	1. Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	72,25	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB
							Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	83,97
							Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,55
						2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (%)	33,33 %

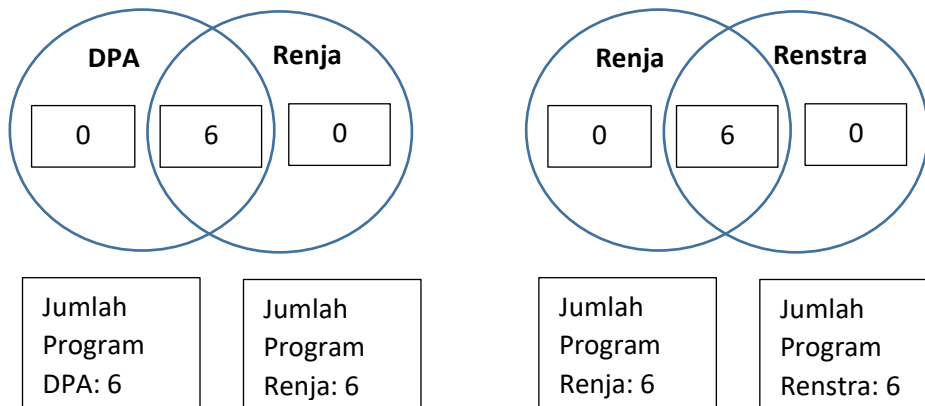
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
		2. Terselesainya Potensi Konflik di Provinsi Kepulauan Riau	3. Persentase Potensi Konflik Yang Terselesaikan	%	100	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	100 %
							2. Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara (%)	0,002 %
						2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan (%)	85 %
						3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Potensi Konflik antar Agama	100 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
						4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %

BAB III

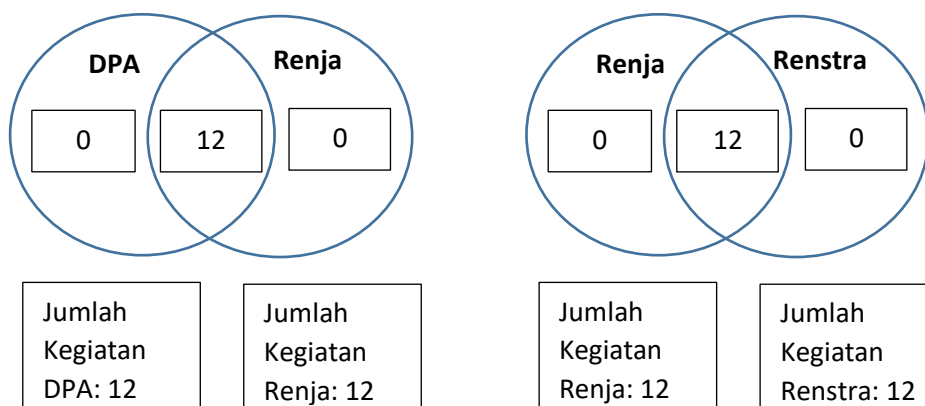
PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DPA, RENJA DAN RENSTRA BADAN KESBANGPOL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Perbandingan Jumlah Program DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah



1. Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat Konsistensi jumlah Program dalam Renja dengan Program yang ada dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

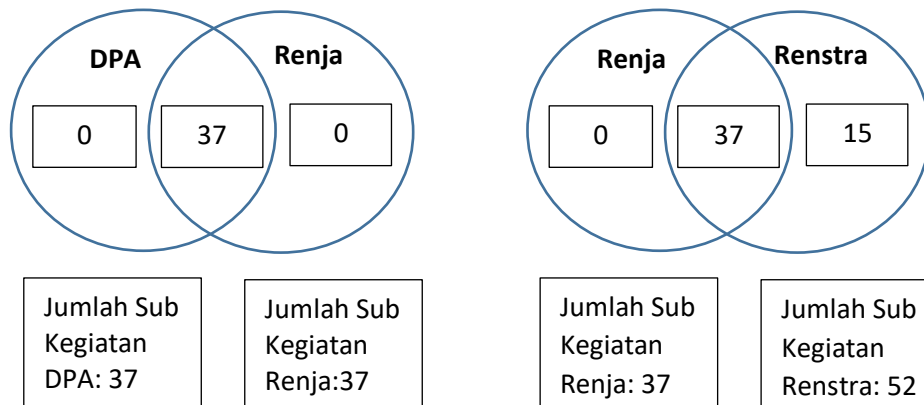
B. Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah



Uraian penjelasan:

1. Terdapat konsistensi kegiatan DPA Tahun Anggaran 2024 dengan kegiatan yang ada dalam usulan Renja 2025, dimana semua kegiatan yang ada dalam usulan Renja 2025 dapat diakomodir dalam DPA Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

C. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah



Uraian penjelasan:

1. Terdapat inkonsistensi sub kegiatan (Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 dengan kegiatan yang ada dalam usulan Renja 2025 , dimana sub kegiatan yang ada dalam usulan Renja 2025 yang diakomodir dalam DPA hanya 37 dari 52 sub kegiatan yang ada dalam Renja 2025. Hal ini terjadi karena ketersediaan anggaran pada APBD Tahun 2025 kurang memadai untuk mendukung semua sub kegiatan yang terdapat dalam usulan Renja 2025.
2. Sedangkan antara Renja dengan Renstra tidak ada selisih dan terjadi konsistensi dimana dari 52 sub kegiatan dalam Renstra semuanya masuk dalam Renja Tahun 2025.

BAB IV CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RENJA

Untuk Melihat Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran/Kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari penyajian Tabel 4.1 di bawah ini.

A. Capaian Target Indikator Sasaran

Berikut ini akan diuraikan Realisasi Pencapaian Sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau pada Twiwulan IV tahun 2025, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yang tertuang dalam tabel sebagai berikut : (Tabel 4.1)

**Tabel 4.1
Pencapaian Target Indikator Sasaran TW IV**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Beragama yang Rukun, Toleran, Demokratis Berlandaskan Pancasila dan UUD'45 di Provinsi Kepulauan Riau		1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi	Indeks	77,67	80,83	104,07
			2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi	Indeks	84,32-84,40	83,68	99,24
		1. Meningkatnya kapasitas Lembaga Demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau	1. Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	72,25	77,11	106,727
		2. Terselesaikanya Potensi Konflik di Provinsi Kepulauan Riau	1. Persentase Potensi Konflik Yang Terselesaikan	Indeks	100	100	100

Berikut akan diuraikan kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan hingga Triwulan IV Tahun 2025.

Menurut catatan yang tersedia dalam table 4.1 Pengukuran Pencapaian Target **Tujuan** yaitu Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Beragama yang Rukun, Toleran, Demokratis Berlandaskan Pancasila dan UUD'45 di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Sasaran yaitu : 1. Meningkatnya kapasitas Lembaga Demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau dan 2. Terselesaikannya Potensi Konflik di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sasaran 1 Dapat dijelaskan bahwa dalam Upaya Meningkatnya kapasitas Lembaga Demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau dengan indikator Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dengan target 72,25 dengan capaian angka Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dengan capaian 77,11 dan capaian kinerja mencapai 106,72% yang berada diatas level nilai evaluasi $91 \% \leq 100\%$ dengan mendapat status "Sangat Tinggi".

Sementara untuk sasaran 2 berupa Terselesaikannya Potensi Konflik di Provinsi Kepulauan Riau dengan indikator Persentase Potensi Konflik Yang Terselesaikan pada Target 100% dan Persentase Potensi Konflik Yang Terselesaikan pada Triwulan IV Tahun 2025 ini angkanya 100, dimana berada pada level nilai evaluasi $91 \% \leq 100\%$ dengan mendapat status "Sangat Tinggi".

B. Capaian Target Indikator Program

Tabel di bawah ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator program Renja 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang dievaluasi.

Tabel 4.2
Pencapaian Target Indikator Program Triwulan IV Tahun 2025

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 (TW IV)	% Capaian Target 2025 (TW {IV})
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani (%)	%	100	100	100
2.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (%)	%	85	80	94,12
3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	%	100	100	100
4.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	%	100	100	100
		Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara (%)	%	0,000837	0,001040	128
5.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga	Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (%)	%	33,33	33,33	100,00

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 (TW IV)	% Capaian Target 2025 (TW {IV})
6.	Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	100
		Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	83,97	86,47	102,98
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	88,55	88,63	100,09

Sesuai dengan Tabel 4.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa sampai Triwulan IV Tahun 2025 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial capaian Targetnya di angka 100 %, capaian ini didapat karena tidak ada terjadi Konflik Sosial berskala besar di Provinsi Kepulauan Riau sampai Triwulan IV tahun 2025, sehingga capaian targetnya 100 %. Hal ini mencerminkan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial ini pada Triwulan IV Tahun 2025 ini berada pada interval nilai evaluasi $91 \% \leq 100 \%$ dengan status "**Sangat Tinggi (ST)**".

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang capaian Targetnya pada Triwulan IV Tahun 2025 ini di angka 80 %, dimana Organisasi Masyarakat yang sesuai aturan perundangan-undangan yang terdata di Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau yang masa aktif Organisasinya masih berlaku pada tahun 2025 yang ditargetkan 85 %, dimana Ormas/LSM yang masih berlaku sampai tahun 2025 yang terdata sampai Triwulan IV Tahun 2025 adalah 224 Ormas, dengan 223 Ormas yang sesuai dengan aturan perundang-undangan sampai tahun 2025, dengan capaian targetnya 80 % dan Persentase capaian target kinerjanya pada Triwulan

IV Tahun 2025 adalah sebesar 94,12 % dan berada pada interval nilai evaluasi $91 \% \leq 100 \%$ dengan status **"Sangat Tinggi"**.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator Persentase Potensi Konflik antar Agama yang tertangani targetnya 100 %, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, tidak terdapat konflik antar agama berskala besar di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga capaiannya 100 % yang berada pada interval nilai evaluasi $91 \leq 100\%$ dengan capaian status **"Sangat Tinggi"**.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan 2 indikator :

1. indikator Persentase Potensi Konflik antar suku dan etnis yang tertangani, dimana tidak adanya terjadi konflik antar suku dan etnis yang terjadi berskala besar sampai Triwulan IV tahun 2025, sehingga capaiannya 100 % yang berada pada level nilai evaluasi $91 \% \leq 100\%$ dengan mendapat status **"Sangat Tinggi"**. dan 2. Indikator persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara dengan target 0,000837% dari jumlah masyarakat di provinsi kepulauan riau dengan capaian target 0,00104% masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Sehingga hasil capaian kinerjanya 128% yang berada diatas level nilai evaluasi $91 \% \leq 100\%$ dengan mendapat status **"Sangat Tinggi"**.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (%). Untuk indikator diatas sampai Triwulan IV dengan capaian 33,33, dimana target indicator tesebut adalah 33,33. Capaian persentase kinerja sebesar **100 %** yang berada pada level nilai evaluasi $91 \% \leq 100\%$ dengan status **"Sangat Tinggi"**.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor, dengan target capaian indikatornya 100 %, dimana sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 ini capaian indikatornya sudah berada pada angka 100 % , sehingga apabila kita lihat pada tabel evaluasi Renja Triwulan IVI berada pada level nilai evaluasi $91 \% \leq 100\%$ dengan status **"Sangat Tinggi"**.

C. Capaian Target Indikator Kegiatan

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi.
(Tabel 4.3)

Tabel 4.3 Pencapaian Target Indikator Kegiatan s /d Triwulan 2025 (per 31 Desember 2025)

Kode Urusan/Bid ang Urusan/Pro gram/Kegi giatan / Sub Kegiatan	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran Program (outcome) /Kegi atan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%) (n)	Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2029		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Permas lahan yang Dihadapi		
					I	II	III	IV	15=14	16 =15/10 (DPPA)*100	17	18= 9+15	20 = 18/8*100%	20	21													
3	4	5	6	7	10				#	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
					K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
									Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																			
			1. Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)	Indeks	77,67	27.727.977.966	77,67	27.727.977.966							80,83	24.893.397.125	80,83	24.893.397.125	104,07	89,78	S T	T	155,33	162.866.718.485	209,11	8,72		
			2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	Indeks	84,32 - 84,46	17.149.991.811	84,32 - 84,46	17.149.991.811							83,68	16.742.636.913	83,68	16.742.636.913	99,24	97,62	S T	S T	165,89	58.928.440.056	196,74	9,05		
			1. Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	72,25	27.727.977.966	72,25	27.727.977.966							77,11	24.893.397.125	77,11	24.893.397.125	106,72 7	89,78	S T	T	151,36	162.866.718.485	179,50 7	8,7217 61		
			2. Persentase Potensi Konflik Yang Terselamatkan	%	100	17.149.991.811	100	17.149.991.811							100	16.742.636.913	100	16.742.636.913	100	97,62	S T	S T	200	58.928.440.056	237,19 2	9,0453 69		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	22.454.254.766	BB	22.454.254.766							BB	19.622.752.271	100	19.622.752.271	100	87	S T	T	100	32.635.169.683	#VALUE!	20		
			Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	83,97		83,97								86,47		86,47		102,98		S T		175		94			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	88,55		88,55								88,63		88,63		100,09		S T		177		100			
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan	7	67.105.712	7	67.105.712							7	65.305.019	7	65.305.019	100,00	97,32	S T	S T	14	233.555.146	17	9		

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025

Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bid ang Urusan/Pro gram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/ Kegiat an (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%)(n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2029		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Permasa lahan yang Dihadapi
									I		II		III		IV													
									#		12		13		14		15=14		16 =15/10 (DPPA)*100		17		18= 9+15		20 = 18/8*100%			
					Renja Perubahan		DPPA										15		16				18		19			
3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	20	21
									Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Doku men	22	268.525.510	22	268.525.510							22	264.545.065	22	264.545.065	100,00	98,52	S T	S T	41	562.843.370	19	15		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Doku men	0	-	0	-								-		-					-	-	-	-		
8.01.01.1.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Doku men	22	268.525.510	22	268.525.510							22	264.545.065	22	264.545.065	100,00	98,52	S T	S T	41	562.843.370	19	15		
8.01.01.1.01. 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Doku men												0		-					-	-	-	-		
8.01.01.1.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Lapor an	7	67.105.712	7	67.105.712							7	65.305.019	7	65.305.019	100,00	97,32	S T	S T	14	233.555.146	17	9		
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertelaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Lapor an	1	24.169.088	1	24.169.088							1	22.360.260	1	22.360.260	100,00	92,52	S T	S T	2	83.039.297	17	5		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	Orang / Bulan	31	8.426.861.288	31	8.426.861.288							31	8.174.112.006	31	8.174.112.006	100,00	97,00	S T	S T	62	15.915.722.838	8	13		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Lapor an	0	-	0	-															-	-	-	-		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Doku men	1	543.902.000	1	543.902.000							1	493.948.500	1	493.948.500	100,00	90,82	S T	T	2	1.157.504.500	17	11		

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025

Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bid- ang Urusan/Pro- gram/Kepolisian/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidan- g Urusan/ Pencapaian Daerah/ Program/Kep- olisian/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satu- an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)				Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%)(n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d PD 2025 s/d Tahun 2029		Unit Perang- kat Daerah Penang- gung Jawab	Permasa- lahan yang Dihadapi
					10				I	II	III	IV	15=14		16 =15/10 (DPPA)*100		17		18= 9+15		20 = 18/8*100%									
					Renja Perubahan		DPPA		#	12	13	14	15		16		17		18		19									
3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	R	P	K	R	P	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	20	21				
									Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																					
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	Orang / Bulan	31	8.426.861.288	31	8.426.861.288							31	8.174.112.006	31	8.174.112.006	100,00	97,00	S T	S T	62	15.915.722.838	8	13				
8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Doku- men	1	543.902.000	1	543.902.000							1	493.948.500	1	493.948.500	100,00	90,82	S T	T	2	1.157.504.500	17	11				
8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Lapor- an	1	24.169.088	1	24.169.088							1	22.360.260	1	22.360.260	100,00	92,52	S T	S T	2	83.039.297	17	5				
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Lapor- an											0	-		-			-	-	-	-	-	-				
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian kantor secara lengkap dan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	63	123.224.000	61	123.224.000							63	123.224.000	63	123.224.000	103,28	100,00	S T	S T	64	171.054.000	17	41				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	12	48.387.500	1	48.387.500							1	38.375.000	1	38.375.000	100,00	79,31	S T	T	1	38.375.000	0	12				
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut	Tersedianya Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	63	123.224.000	61	123.224.000							63	123.224.000	63	123.224.000	103,28	100,00	S T	S T	64	171.054.000	17	41				
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	12	48.387.500	1	48.387.500							1	38.375.000	1	38.375.000	100,00	79,31	S T	T	1	38.375.000	0	12				
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran secara lengkap dan sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Doku- men	1	22.610.427	1	22.610.427							1	21.430.107	1	21.430.107	100,00	94,78	S T	S T	1	21.430.107	20	14				
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	Lapor- an	1	170.355.000	1	170.355.000							1	144.985.000	1	144.985.000	100,00	85,11	S T	T	2	159.485.000	17	39				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Lapor- an	1	1.062.134.621	1	1.062.134.621							1	1.006.134.201	1	1.006.134.201	100,00	94,73	S T	S T	2	1.930.296.040	17	17				

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025

Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bid ang Urusan/Pro gram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiat an (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%) (n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2025		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Permasa lahan yang Dihadapi	
									I				II		III												IV
					10				#	12	13	14		15=14		16 =15/10 (DPPA)*100		17			18= 9+15		20 = 18/8*100%				
					Renja Perubahan		DPPA		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		15		16				18
3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	20	21			
									Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Doku men	1	116.534.269	1	116.534.269						1	114.844.995	1	114.844.995	100,00	98,55	S T	S T	2	242.803.995	17	17		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	0	-	0	-						0	-	0	-			-	-	-	-				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	0	-	0	-						0	-	0	-			-	-	-	-				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1	87.247.800	1	87.247.800						1	85.550.986	1	85.550.986	100,00	98,06	S T	S T	13	244.081.986	17	20		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	64.217.452	1	64.217.452						1	63.629.860	1	63.629.860	100,00	99,08	S T	S T	2	104.891.610	17	29		
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket											0	-				-	-	-	-				
8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket											0	-				-	-	-	-				
8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	64.217.452	1	64.217.452						1	63.629.860	1	63.629.860	100,00	99,08	S T	S T	2	104.891.610	17	29		
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1	87.247.800	1	87.247.800						1	85.550.986	1	85.550.986	100,00	98,06	S T	S T	13	244.081.986	17	20		
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	Lapor an	1	170.355.000	1	170.355.000						1	144.985.000	1	144.985.000	100,00	85,11	S T	T	2	159.485.000	17	39		
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Lapor an	1	1.062.134.621	1	1.062.134.621						1	1.006.134.201	1	1.006.134.201	100,00	94,73	S T	S T	2	1.930.296.040	17	17		
8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Doku men	1	22.610.427	1	22.610.427						1	21.430.107	1	21.430.107	100,00	94,78	S T	S T	1	21.430.107	20	14		

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025

Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bid ang Urusan/Pro gram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) /Kegiat an (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%)(n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2029		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Permasa lahan yang Dihadapi				
									I		II		III		IV			15=14			16 =15/10 (DPPA)*100 16		17				18= 9+15		20 = 18/8*100%	
									#		12		13		14			15			16		17				18		19	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7																										
										Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																				
8.01.01.1.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Doku men	1	116.534.269	1	116.534.269							1	114.844.995	1	114.844.995	100,00	98,55	S T	S T	2	242.803.995	17	17				
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Tersedianya barang kantor penunjang urusan perkantoran secara memadai dan sesuai ketentuan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Unit	0	-	0	-							-	-		-					-	-	-	-				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	4	8.962.668.698	4	8.962.668.698							4	6.898.686.175	4	6.898.686.175	100,00	76,97	S T	T	45	7.145.315.175	27	88				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Paket	0	-	0	-							0	-	0	-					-	-	-	-				
8.01.01.1.07. 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Unit											0	-		-					-	-	-	-				
8.01.01.1.07. 0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Paket											0	-		-					-	-	-	-				
8.01.01.1.07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	4	8.962.668.698	4	8.962.668.698							4	6.898.686.175	4	6.898.686.175	100,00	76,97	S T	T	45	7.145.315.175	27	88				
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya jasa penunjang urusan kantor secara optimal dan sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Lapor an	1	1.460.956.502	1	1.460.956.502							1	1.108.532.739	1	1.108.532.739	100,00	75,88	S T	S	2	2.307.301.239	17	26				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Lapor an	1	593.161.504	1	593.161.504							1	593.095.503	1	593.095.503	100,00	99,99	S T	S T	2	1.696.383.125	17	40				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Lapor an	1	95.002.000	1	95.002.000							1	94.771.720	1	94.771.720	100,00	99,76	S T	S T	2	134.751.720	8	25				
8.01.01.1.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Lapor an	1	1.460.956.502	1	1.460.956.502							1	1.108.532.739	1	1.108.532.739	100,00	75,88	S T	S	2	2.307.301.239	17	26				

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025

Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bid ang Urusan/Pro gram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)				Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%)(n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2029				Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Permasa lahan yang Dihadapi
									I				II		III																			
					10				#	12		13		14		15=14		16 =15/10 (DPPA)*100		17	18= 9+15		20 = 18/8*100%		20	21								
					Renja Perubahan		DPPA			K		Rp		K		Rp		K			Rp		K				Rp		K		Rp			
3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
									Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																									
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	95.002.000	1	95.002.000							1	94.771.720	1	94.771.720	100,00	99,96	S T	S T	2	134.751.720	8	25								
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	593.161.504	1	593.161.504							1	593.095.503	1	593.095.503	100,00	99,99	S T	S T	2	1.696.383.125	17	40								
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Ususan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya pemeliharaan barang-barang kantor secara teratur sesuai ketentuan	Jumlah Kendaraan pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	0	-	0	-							0	-	0	-																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	0	-	0	-							0	-	0	-																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	5	20.288.000	5	20.288.000							5	19.738.200	5	19.738.200	100,00	97,29	S T	S T	14	25.910.200	7	10								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	9	296.903.395	9	296.903.395							9	289.482.935	9	289.482.935	100,00	97,50	S T	S T	18	460.425.335	8	13								
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit											0	-																		
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	9	296.903.395	9	296.903.395							9	289.482.935	9	289.482.935	100,00	97,50	S T	S T	18	460.425.335	8	13								
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	5	20.288.000	5	20.288.000							5	19.738.200	5	19.738.200	100,00	97,29	S T	S T	14	25.910.200	7	10								

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025
Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiat an (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%)(n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2029		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Permasa lahan yang Dihadapi
									I				II		III													
					10				#	12		13		14		15=14		16 =15/10 (DPPA)*100 16		17	18= 9+15		20 = 18/8*100%		20	21		
					Renja Perubahan		DPPA			15		19																
3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	R P	K	R P	K	R P	K	Rp	K	R P	K	R P	K	Rp	K	R P	K	Rp	K	Rp
									Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																			
8.01.01.1.09. 0009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertakutnya Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit)	Unit											0	-					-	-			-	-		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Mewujudkan Kerukunan Bangsa	Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	%	100	1.959.964.051	100	1.959.964.051					100	1.850.151.111	10 0	1.850.151.111	100	94	S T	S T	200	4.169.681.303	100	11				
			Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara (%)	%	0,00083 7		0,00081 5						0,001 040		0,0 01		128		S T		0		7					
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tertakutnya penanganan konflik sosial serta pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara bagi masyarakat, pe muda, dan Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	Doku men	0	-	0	-					0	-	0	-					-	-	-	-				
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)	Doku men	0	-	0	-					0	-	0	-					-	-	-	-				
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	Doku men	0	-	0	-					0	-	0	-					-	-	-	-				

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025
Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%)(n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2029		Unit Perangkat Daerah Pemang gung Jawab	Permasalahan yang Dihadapi						
									I				II		III													IV					
					10				#	12	13	14		15=14		16 =15/10 (OPPA)*100 16												17	18= 9+15		20 = 18/8*100%		
					Renja Perubahan		DPPA								15													16		18		19	
3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	20	21									
									Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																								
		32516	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	Laporan	1	50.609.662	1	50.609.662							1	42.042.853	1	42.042.853	100,00	83,07	S T	T	2	120.309.950	17	4							
		0,01468958	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	Orang	500	281.575.392	500	281.575.392							1000	267.548.184	1000	267.548.184	200,00	95,02	S T	S T	1.150	801.704.580	2	12							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	Orang	320	46.828.310	320	46.828.310							320	9.195.630	320	9.195.630	100,00	19,64	S T	S R	320	9.195.630	53	13							
			Jumlah Pasakbraka (Orang)	Orang	62	1.411.114.248	62	1.411.114.248							62	1.377.274.410	62	1.377.274.410	100,00	97,60	S T	S T	107	3.084.381.109	30	13							
			Jumlah Pumpsakbraka Duta Pancasila (Orang)	Orang	50	-	0	-							0	-	0	-					-	-	-	-							
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Pumpsakbraka Duta Pancasila (Dokumen)	Dokumen	1	169.836.439	1	169.836.439							1	154.090.034	1	154.090.034	100,00	90,73	S T	T	1	154.090.034	17	24							
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepasakbrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Pumpsakbraka (Dokumen)	Dokumen	1	-	0	-							0	-	0	-					-	-	-	-							
			Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)	Dokumen	1	-	0	-							0	-	0	-					-	-	-	-							

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025

Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bid ang Urusan/Pro gram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Keji sahan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiat an (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%) (n)				Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2029				Unit Perang kat Daerah Penang guang Jawab	Permasa lahan yang Dihadapi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													I				II					III					IV				15=14						16 =15/10 (DPPA)*100				17				18= 9+15				20 = 18/8*100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									#				12				13					14					15				16						18				19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					K		Rp		K		Rp		K	R P	K	R P	K	R P	K	R P		K	R P	K	R P		K	R P	K	R P	K	R P	K	R P			K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K	R P	K

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025

Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bid ang Urusan/Pro gram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidan g Urusan/ Pencapaian Dasarh/ Program/Knj atan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%)(n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2029		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Permasa lahan yang Dihadapi
									I				II		III													
					10				#	12		13		14		15=14		16 =15/10 (DPPA)*100		17		18= 9+15		20 = 18/8*100%				
					Renja Perubahan		DPPA									15		16				18		19				
3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	20	21				
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Tertaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)	Dokumen	1	-	0	-					0	-	0	-					-	-	-	-				
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	Orang	50	-	0	-					0	-	0	-					-	-	-	-				
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	Tertaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	Dokumen	1	-	0	-					0	-	0	-					-	-	-	-				
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Tertaksananya pengasan askibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)	Dokumen	0	-	0	-					0	-	0	-					-	-	-	-				
8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Tertaksananya pengasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	Dokumen	1	169.836.439	1	169.836.439					1	154.090.034	1	154.090.034	100,00	90,73	S T	T	1	154.090.034	17	24				
8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Tertaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	Dokumen	0	-	0	-					0	-	0	-					-	-	-	-				
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	Orang	62	1.411.114.248	62	1.411.114.248					62	1.377.274.410	62	1.377.274.410	100,00	97,60	S T	S T	107	3.084.381.109	30	13				
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Melalui Pendidikan Politik	Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (%)	%	33,33	5.273.723.200	33,33	5.273.723.200					33,33	5.270.644.854	33,33	5.270.644.854	100,00	99,94	S T	S T	33	130.231.548.802	55	3				

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025
Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah/ Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)				Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%)(n)				Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra a PD 2025 s/d Tahun 2029				Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Permasa lahan yang Dihadapi		
									I				II		III																						IV	
					10				#				12		13		14		15=14				16 =15/10 (DPPA)*100				17		18= 9+15				20 = 18/8*100%					
					Renja Perubahan				DPPA												15				16								18				19	
3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	R P	K	R P	K	R P	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R P	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	20	21						
										Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																												
8.01.03.1.01	Perumutan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pewakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya peran partai politik dan Lembaga Pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan politik di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pewakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	Orang	71	5.171.643.200	71	5.171.643.200							71	5.170.723.582	71	5.170.723.582	100,00	99,98	S T	S T	171	94.857.149.114	12	3												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pewakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	Orang	600	56.061.200	600	56.061.200							600	54.048.659	600	54.048.659	100,00	96,41	S T	S T	700	34.613.390.183	2	1												
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pewakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	Lapor an	1	46.018.800	1	46.018.800							1	45.872.613	1	45.872.613	100,00	99,68	S T	S T	1	761.009.505	20	3												

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025

Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/ Kegiat an (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)				Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%) (n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2029		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Permasa lahan yang Dihadapi
3	4	5	6	7	10				#	12	13	14				15=14		16 =15/10 (DPPA)*100		17	18= 9+15		20 = 18/8*100%		20	21						
					Renja Perubahan		DPPA									15		16			18		19									
					K	Rp	K	Rp				K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp				
									Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																							
8.01.03.1.01. 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pewakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik d Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pewakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pewakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	Orang	600	56.061.200	600	56.061.200							600	54.048.659	600	54.048.659	100,00	96,41	S T	S T	700	34.613.390.183	2	1						
8.01.03.1.01. 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pewakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik d Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pewakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pewakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	Orang	71	5.171.643.200	71	5.171.643.200							71	5.170.723.982	71	5.170.723.982	100,00	99,98	S T	S T	171	94.857.149.114	12	3						
8.01.03.1.01. 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pewakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik d Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pewakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pewakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	Lapor an	1	46.018.800	1	46.018.800							1	45.872.613	1	45.872.613	100,00	99,98	S T	S T	1	761.009.505	20	3						

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025

Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Keji atan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/ Keji atan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)				Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%) (n)				Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2029				Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Permasa lahan yang Dihadapi
									I				II		III																					
					10				#	12	13	14		15=14		16 =15/10 (DPPA)*100 16		17		18= 9+15		20 = 18/8*100%		20	21											
					Renja Perubahan		DPPA							15		18				19																
3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
									Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																											
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAK ATAN	Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan (%)	%	85	2.079.165.000	85	2.079.165.000						80	1.825.239.562	80	1.825.239.562	94,12	87,79	S T	T	177	6.111.835.227	99	15											
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemerintahan Pelaksanaan Bidang Pembudayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertarikan Ormas,LSM terhadap ketentuan hukum dalam pembelenggaraan aktivitas organisasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	Lapor an	1	46.650.000	1	46.650.000						1	45.975.000	1	45.975.000	100,00	98,55	S T	S T	2	122.450.425	20	4											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	Orang	100	1.855.015.000	100	1.855.015.000						100	1.620.932.380	100	1.620.932.380	100,00	87,38	S T	T	225	5.783.482.570	20	17											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	Orang	150	177.500.000	150	177.500.000						150	158.332.182	150	158.332.182	100,00	89,20	S T	T	200	205.902.232	17	11											
8.01.04.1.01. 0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tertakutannya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	Orang	150	177.500.000	150	177.500.000						150	158.332.182	150	158.332.182	100,00	89,20	S T	T	200	205.902.232	17	11											

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025
Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bid ang Urusan/Pro gram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiat an (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)				Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%) (n)				Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2025				Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Permasa lahan yang Dihadapi
					10				I	II	III	IV	15=14				16 =15/10 (DPPA)*100				17	18= 9+15				20 = 18/8*100%										
					Renja Perubahan		DPPA		#	12	13	14	15				16					18				19										
K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	Rp	K		Rp	K	Rp	20	21										
3	4	5	6	7																																
										Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																										
8.01.04.1.01. 0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tertaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	Orang	100	1.855.015.000	100	1.855.015.000							100	1.620.932.380	100	1.620.932.380	100,00	87,38	S T	T	225	5.783.482.570	20	17										
8.01.04.1.01. 0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tertaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	Lapor an	1	46.650.000	1	46.650.000							1	45.975.000	1	45.975.000	100,00	98,55	S T	S T	2	122.450.425	20	4										
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	%	100	1.120.329.600	100	1.120.329.600							100	1.112.879.482	100	1.112.879.482	100,00	99,34	S T	S T	252	2.795.956.992	100	11										
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tertaksananya penanganan konflik ekonomi, budaya, dan agama sesuai kewenangan pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Diusun (Dokumen)	Doku men	0	-	0	-							0	-	0	-																		

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025
Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)				Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%)(n)				Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra a PD 2025 s/d Tahun 2029				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Permasalahan yang Dihadapi
									I				II		III																					
					10				#	12		13		14		15=14				16 =15/10 (DPPA)*100				17		18= 9+15				20 = 18/8*100%						
					Renja Perubahan		DPPA		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15				16				18		19					
3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	20	21								
									Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	Orang	150	73.290.500	150	73.290.500						150	66.711.500	150	66.711.500	100,00	91,02	S T	S T	200	218.567.824	5	5											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	Orang	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000						100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100,00	100,00	S T	S T	201	2.441.055.912	119	14											
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	Laporan	1	47.039.100	1	47.039.100						1	46.167.982	1	46.167.982	100,00	98,15	S T	S T	2	136.333.256	17	4											
8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	Dokumen												0	-																			

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025

Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bid ang Urusan/Pro gram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidan g Urusan/ Pemerintahan Daerah/ Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiat an (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%) (n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2029		Unit Perang kat Daerah Pemang gung Jawab	Permasa lahan yang Dihadapi	
									I		II		III		IV													
					10				#	12	13	14		15=14		16 =15/10 (DPPA)*100		17		18= 9+15		20 = 18/8*100%						
					Renja Perubahan		DPPA		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			20
3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	20	21		
									Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																			
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tertaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	Orang	150	73.290.500	150	73.290.500					150	66.711.500	150	66.711.500	100,00	91,02	S	T	200	218.567.824	5	5				
8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tertaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	Orang	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000					100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100,00	100,00	S	T	201	2.441.055.912	119	14				
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tertaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	Laporan	1	47.039.100	1	47.039.100					1	46.167.982	1	46.167.982	100,00	98,15	S	T	2	136.333.256	17	4				
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEMASPADAA N NASIONAL DAN PENINGKATAN K KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Konflik Sosial	Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani (%)	%	100	11.990.533.160	100	11.990.533.160					100	11.954.366.758	100	11.954.366.758	100,00	99,70	S	T	200	45.850.966.534	100	8				

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025
Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bid ang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiat an (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%)(n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2029		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Permasa lahan yang Dihadapi		
									I				II		III														IV	
					10				#	12	13	14	15=14		16 =15/10 (DPPA)*100		17	18= 9+15		20 = 18/8*100%		20	21							
					Renja Perubahan		DPPA		K		Rp		K	R P	K	R P	K	R P	K	Rp	K			Rp	K	Rp			K	Rp
3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	R P	K	R P	K	R P	K	Rp	K	Rp	K	R P	K	Rp	K	Rp	K	Rp	20	21		
									Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																					
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tertelaksananya penanganan potensi konflik sosial sesuai kewenangan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	Orang	120	147.934.500	120	147.934.500							120	137.988.300	120	137.988.300	100,00	93,28	S T	S T	200	340.537.506	10	11				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	Orang	150	4.524.922.180	150	4.524.922.180							150	4.510.842.238	150	4.510.842.238	100,00	99,69	S T	S T	1.114	34.914.714.935	7	18				
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	Laporan	1	54.781.900	1	54.781.900							1	54.364.000	1	54.364.000	100,00	99,24	S T	S T	2	342.587.373	17	4				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	Dokumen	1	7.262.894.580	1	7.262.894.580							1	7.251.172.220	1	7.251.172.220	100,00	99,84	S T	S T	5	10.253.126.720	4	6				

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025

Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bid ang Urusan/Pro gram/Pro gram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) /Kegiat an (output) / Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025								Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%)(n)	Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2029		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Permasa lahan yang Dihadapi				
													I	II	III	IV				15=14		16 =15/10 (DPPA)*100	17			18= 9+15		20 = 18/8*100%	
									#	12	13	14		15		16				18	19								
					Renja Perubahan		DPPA		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp				K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	20	21							
									Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																				
8.01.06.1.01. 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dit. Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tertelaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dit. Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dit. Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	Orang	120	147.934.500	120	147.934.500					120	137.988.300	120	137.988.300	100,00	93,28	S T	S T	200	340.537.506	10	11					
8.01.06.1.01. 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dit. Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tertelaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dit. Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dit. Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	Orang	150	4.524.922.180	150	4.524.922.180					150	4.510.842.238	150	4.510.842.238	100,00	99,69	S T	S T	1.114	34.914.714.935	7	18					
8.01.06.1.01. 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dit. Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tertelaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dit. Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dit. Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	Laporan	1	54.781.900	1	54.781.900					1	54.364.000	1	54.364.000	100,00	99,24	S T	S T	2	342.587.373	17	4					

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025
Badan Kesatuan Banasa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kode Urusan/Bid ang Urusan/Pro gram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiat an (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satu an	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan 2025 yang dievaluasi (n)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran 2025 yang dievaluasi (%)(n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2025 s/d Tahun 2029		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Permasa lahan yang Dihadapi
									I				II		III													
					10				#	12		13		14		15=14		16 =15/10 (DPPA)*100		17		18= 9+15		20 = 16/8*100%				
					Renja Perubahan				DPPA										15		16		18		19			
					K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp		
3	4	5	6	7																			20	21				
										Realisasi Triwulan I-III dikosongkan																		
8.01.06.1.01. 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan	Tertindakanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	Doku men	1	7.262.894.580	1	7.262.894.580						1	7.251.172.220	1	7.251.172.220	100,00	99,84	S T	S T	5	10.253.126.720	4	6			
						44.877.969.777		44.877.969.777							41.636.034.038		41.636.034.038		92,78		S T		221.795.158.541		67			
																	Rata-rata capaian indikator kinerja Tujuan :	100,00		S T		160,61		202,93				
																	Rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran :	100		S T		175,68		208,349				
																	Rata-rata capaian kinerja indikator program:	100,00		S T		146,06		#VALUE!				
																	Rata-rata capaian kinerja indikator kegiatan:	100,00		S T		132,27		18,05				
																	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan:	100,00		S T		132,27		18,05				

BAB V

KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Akhir Triwulan IV (per 30 Nopember 2025) Tahun Anggaran 2025, maka dapat disimpulkan kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program/Kegiatan/Subkegiatan antara lain :

1. Rata-rata capaian kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepri sampai Triwulan IV Tahun 2025 adalah 70,64 % dengan Sangat Tinggi.
2. Rata-rata capaian kinerja kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepri sampai Triwulan III Tahun 2025 adalah 57,15 % dengan Kategori Sedang.
3. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai Triwulan III Tahun 2025 adalah 37,96 % dengan Kategori Sangat Rendah.
4. Rata-rata capaian keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri Triwulan III Tahun 2026 sebesar 73,65 % dengan Kategori Sangat Tinggi.
5. Indikator Program Renja semua capaian kinerjanya Sangat Tinggi pada Triwulan III Tahun 2025.
6. Indikator Kegiatan Renja semua capaian kinerjanya Sedang pada Triwulan III Tahun 2025.
7. Indikator Sub Kegiatan Renja semua capaian kinerjanya Sangat Rendah pada Triwulan III Tahun 2025.
8. Permasalahan dalam pencapaian target kinerja dan anggaran :
 - a. Capaian Kinerja Indikator sub kegiatan pada trwiwulan III belum maksimal, hal ini dikarenakan beberapa sub kegiatan masih belum 100 % dilaksanakan, karena akan terealisasi pada Triwulan IV. Sementara itu untuk output dari masing-masing sub kegiatan belum terealisasi maksimal pada Triwulan III sesuai target.
9. Laporan Narasi Evaluasi Capaian Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan III Tahun 2025 perlu penyesuaian sesuai hasil desk evaluasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat.

Kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 terkait dengan Urusan Pemerintahan Umum, yang dialokasikan di Tahun 2025, secara garis besar belum berhasil maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dalam pencapaian sasaran dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, menunggu Pelaksanaan kegiatan yang akan tuntas pada Triwulan IV Tahun 2025.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh target kinerja yang ditetapkan rata-rata pada TW IV Desember 2025 Tahun Anggaran 2025 belum **100 %**, dengan rata-rata kinerja Program "**100 %**" dengan predikat "**Sangat Tinggi**". Rata-rata kinerja Kegiatan "**100 %**" dengan predikat "**Sangat Tinggi**", dan Rata-rata kinerja Sub Kegiatan "**100 %**" dengan predikat "**Sangat Tinggi**". Pagu Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 44.877.969.777,00** dengan realisasi keuangan pada TW IV per Nopember 2025 Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 41.636.034.038 (92,78 %)** predikatnya "**Sangat Tinggi**".
2. Seluruh sasaran strategis belum menunjukkan nilai capaian sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu perlu ditingkatkan capaian kinerjanya mulai dari

perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tentunya tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk Tahun anggaran berikutnya.
2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala.
3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan.
4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu

menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 serta dengan memperhatikan perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sampai periode Triwulan III Tahun 2025. Kedepannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.

C. Lampiran :

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



DRS. MUHAMAD IKSAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690501 199401 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**BERITA ACARA
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Pada Hari Selasa Tanggal 27 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan Desk Pengendalian dan Evaluasi terhadap Capaian hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rangkuman hasil desk dimaksud sebagai berikut :

1. Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Renstra Tahun 2025:

Uraian	TW IV
Program	6
Kegiatan	12
Sub Kegiatan	52

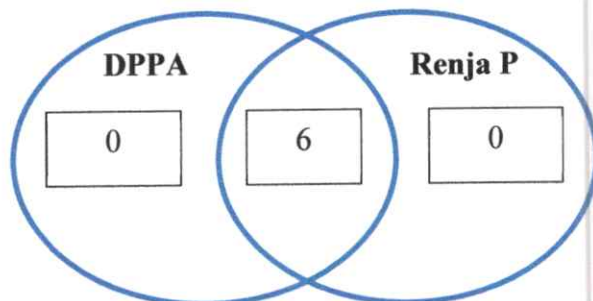
2. Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Renja Perubahan Tahun 2025:

Uraian	TW IV
Program	6
Kegiatan	12
Sub Kegiatan	37

3. Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Perubahan DPA Tahun 2025:

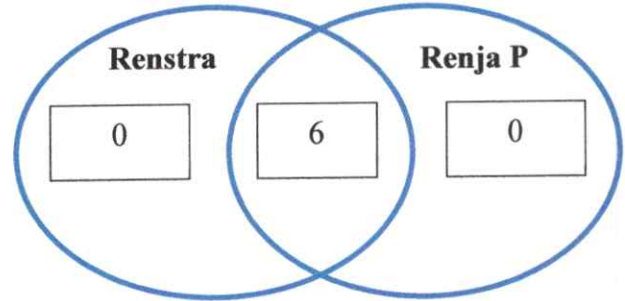
Uraian	TW IV
Program	6
Kegiatan	12
Sub Kegiatan	37

4. Kesesuaian Antara Program/Kegiatan/Sub Kegiatan didalam Dokumen Renja Perubahan dengan Renstra, dan antara Renja Perubahan dengan dengan Perubahan DPA Tahun 2025
- a. Irisan Program Triwulan IV 2025



Jumlah Program
DPPA : 6

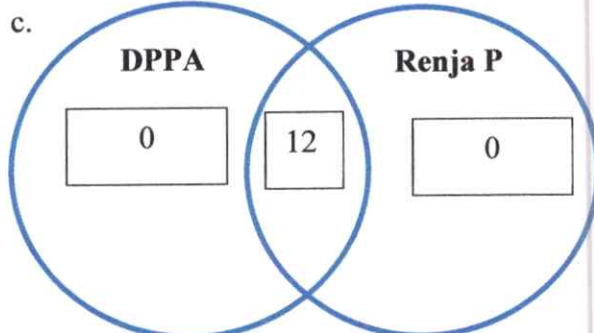
Jumlah Program
Renja P : 6



Jumlah Program
Renstra : 6

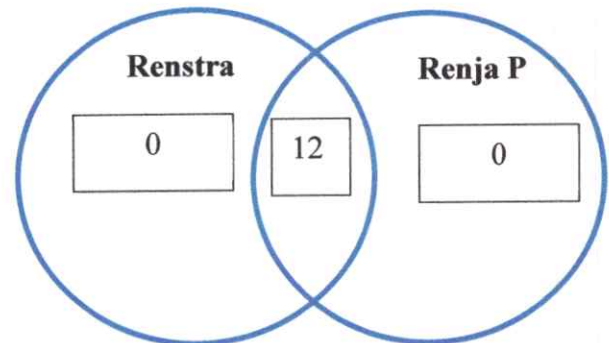
Jumlah Program
Renja P : 6

- b. Irisan Kegiatan Triwulan TW IV 2025



Jumlah
Kegiatan
DPPA : 12

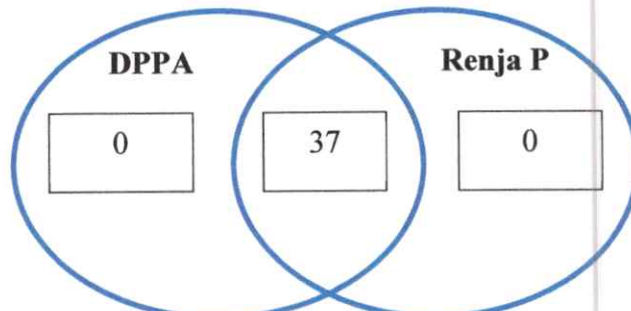
Jumlah Kegiatan
Renja P : 12



Jumlah
Kegiatan
Renstra : 12

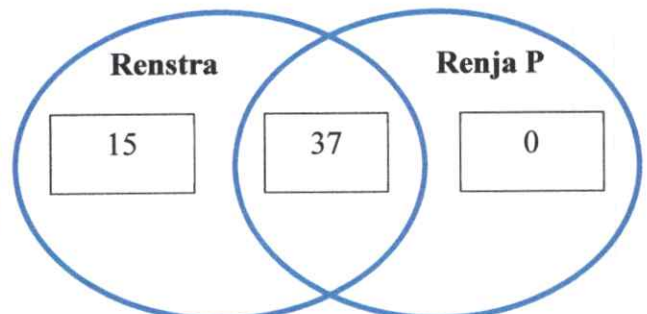
Jumlah Kegiatan
Renja P : 12

- d. Irisan Sub Kegiatan Triwulan TW IV 2025



Jumlah Sub
Kegiatan DPPA:
37

Jumlah Sub
Kegiatan Renja
P : 37



Jumlah Sub
Kegiatan Renstra:
52

Jumlah Sub
Kegiatan Renja P
:37

5. Rata-rata capaian kinerja Program Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025 adalah **100,00 %** dengan Kategori **Sangat Tinggi (ST)**
6. Rata-rata capaian kinerja Kegiatan Renja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025 adalah **100,00 %** dengan Kategori **Sangat Tinggi (ST)**
7. Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan Renja Sampai Triwulan IV Tahun 2025 adalah **100,00 %** dengan Kategori **Sangat Tinggi (ST)**
8. Rata-rata capaian keuangan Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar **92,78 %** dengan Kategori **Sangat Tinggi (ST)**
9. Jumlah Indikator Program yang belum mencapai target sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 0 Indikator Program.
10. Jumlah Indikator Kegiatan yang belum mencapai target sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 0 Indikator Kegiatan.
11. Jumlah Indikator Sub Kegiatan yang belum mencapai target sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 0 Indikator Sub Kegiatan.
12. Permasalahan dalam pencapaian Target Kinerja Renja dan Keuangan:
 - Terdapat tunda bayar sebesar Rp. Rp. 2.311.640.001 yang meliputi 3 Sub Kegiatan dari 3 Kegiatan.
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau agar menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam bentuk laporan narasi yang disesuaikan dengan hasil desk.
14. Penyampaian Laporan beserta Lampiran Formulir Evaluasi Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat tanggal **6 Februari 2026** kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.
15. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangka Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan formulir evaluasi yang diisi oleh Perangkat Daerah.

**Perangkat Daerah:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**



Des Yandri, S.IP

**Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan**



Agustian, S.E., M.Si.